

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN
PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2016-2019**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi (S.Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh

DELVA

NIM. 1804140047

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
TAHUN 1443 H / 2022 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2019

Nama : Delva

NIM : 1804140047

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Islam

Program Studi : Akuntansi Syariah

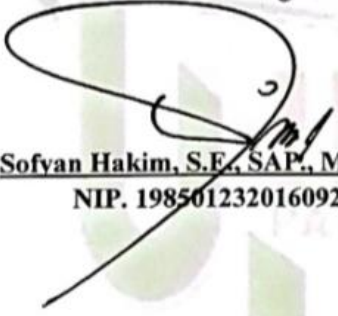
Jenjang : Strata Satu/S1


Palangka Raya, 12 April 2022

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Sofyan Hakim, S.E., SAP., MM., MAP
NIP. 198501232016092722



Hilmi Satria Himawan, S.E., M.Acc., Akt
NIP. 199210112020121017

Mengetahui,

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Plt. Ketua Jurusan
Ekonomi Islam


Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag
NIP. 197404232001121002


Dr. Itsla Yunjsva Aviva, M.E.Sy
NIP. 198910102015032012

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Saudari Delva

Palangka Raya, 12 April 2022

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
FEBI IAIN Palangka Raya

Di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Delva
NIM : 1804140047
Judul : Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2019


Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I

Pembimbing II


Sofyan Hakim, S.E., SAP., MM., MAP
NIP. 198501232016092722


Hilmi Satria Himawan, S.E., M.Acc., Akt
NIP. 199210112020121017

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2019” oleh Delva NIM: 1804140047 telah *dimunqasyahkan* Tim *Munqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 12 April 2022

Palangka Raya, 12 April 2022

Tim Penguji

1. **Jelita, M.SI** (.....)
Ketua Sidang
2. **Dr. Ibnu Al-Saudi, M.M** (.....)
Penguji Utama/I
3. **Sofvan Hakim, S.E., SAP., MM., MAP** (.....)
Penguji II
4. **Hilmi Satria Himawan, S.E., M.Acc., Akt** (.....)
Sekretaris Sidang

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag
NIP. 197404232001121002

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016-2019

ABSTRAK

Oleh: Delva
NIM. 1804140047

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan, digunakan untuk keperluan daerah tersebut. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketiga PAD tersebut berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga dapat mengurangi ketergantungan masing-masing daerah terhadap dana pemerintah pusat. Jika setiap daerah mampu mengurangi ketergantungan terhadap dana pemerintah pusat, maka dapat dikatakan daerah tersebut mempunyai kemandirian atau dapat menggali potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling* dan analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang terdiri dari uji t, uji F dan koefisien determinasi (R^2), dengan menggunakan program SPSS versi 25 yang terlebih dahulu diuji menggunakan uji asumsi klasik. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 56 sampel yang terdiri dari 13 Kabupaten dan 1 Kota yang memiliki realisasi PAD selama 4 tahun yaitu dari tahun 2016-2019.

Hasil penelitian uji t menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah, retribusi daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan Uji F menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian uji koefisien determinasi (R^2) dari ketiga variabel independen mempengaruhi pendapatan asli daerah sebesar 82,9%. Sedangkan, sisanya $100\% - 82,9\% = 17,1\%$ dipengaruhi oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Kata kunci: Pajak daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pendapatan Asli Daerah.

**THE EFFECT OF REGIONAL TAXES, REGIONAL LEVIES,
AND SEPARATED REGIONAL WEALTH MANAGEMENT ON
REGENCY/CITY REGIONAL ORIGINAL INCOME IN
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE 2016-2019**

ABSTRACT

By: Delva
NIM. 1804140047

Local revenue is collected based on local laws and regulations. -invitation, is used for the purposes of the area. Regional original income consists of regional taxes, regional levies, and separated regional wealth management. The three PADs have an effect on increasing regional original income, so as to reduce the dependence of each region on central government funds. If each region is able to reduce dependence on central government funds, it can be said that the region has independence or can explore the potential that exists in their respective regions.

This study aims to examine the effect of regional taxes, regional levies, and separated regional wealth management on Regency/City original revenue in Central Kalimantan Province in 2016-2019. The data used in this research is secondary data. sampling technique used convenience sampling and the data analysis used was multiple linear regression analysis consisting of t test, F test and coefficient of determination (R^2), using SPSS version 25 program which was first tested using the classical assumption test. The number of samples used in this study were 56 samples consisting of 13 regencies and 1 city which had realized PAD for 4 years, from 2016-2019.

The results of the t-test show that local taxes have a significant and positive effect on local revenue, regional retributions have a significant and positive effect on local revenue, the management of separated regional wealth has a significant and positive effect on local revenue. Meanwhile, the F test shows that regional taxes, regional levies, and separated regional wealth management have a significant and positive effect on local revenue. Then test the coefficient of determination (R^2) of the three independent variables affecting local revenue by 82.9%. Meanwhile, the remaining $100\% - 82.9\% = 17.1\%$ is influenced by variables not included in this study.

Keywords: Regional Taxes, Regional Levies, Separate Regional Wealth Management, Regional Original Income.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2019” dengan lancar. Shalawat serta salam kepada Nabi junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, Khatamun Nabiyyin, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumul qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah strata satu pada Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan penghargaan dan terima kasih setulus tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palangka Raya, semoga Allah SWT membalas setiap tetes keringat dalam memajukan dan mengembangkan ilmu agama khususnya di Kampus IAIN Palangka Raya;
2. Bapak Alm. Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si, dan Bapak Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Palangka Raya, peneliti mengucapkan terima kasih karena selalu

memberikan nasihat-nasihat dan dukungan kepada mahasiswa FEBI IAIN Palangka Raya;

3. Bapak Sofyan Hakim, S.E., SAP., MM., MAP selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI IAIN Palangka Raya, sekaligus berperan sebagai dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan banyak ilmunya, arahan dan meluangkan waktunya, serta membimbing peneliti dalam menyelesaikan studi di IAIN Palangka Raya;
4. Bapak Dr. Ibnu Al-Saudi, M.M selaku penguji utama pada seminar proposal dan ujian munaqasah, terima kasih peneliti ucapkan kepada beliau, karena telah memberikan saran dan masukan yang sangat berguna untuk menyempurnakan skripsi saya;
5. Bapak Hilmi Satria Himawan, S.E., M.Acc., Akt selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, mengarahkan, memberikan semangat, motivasi, dan meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi saya;
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang tidak bisa peneliti sebut satu persatu, yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu dalam berbagai ilmu pengetahuan selama peneliti menjalani studi; dan
7. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah banyak mendukung dan membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Jazaakumullahu Khairan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala melimpahkan kebaikan, rahmat, serta karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat umumnya bagi semua pembaca dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

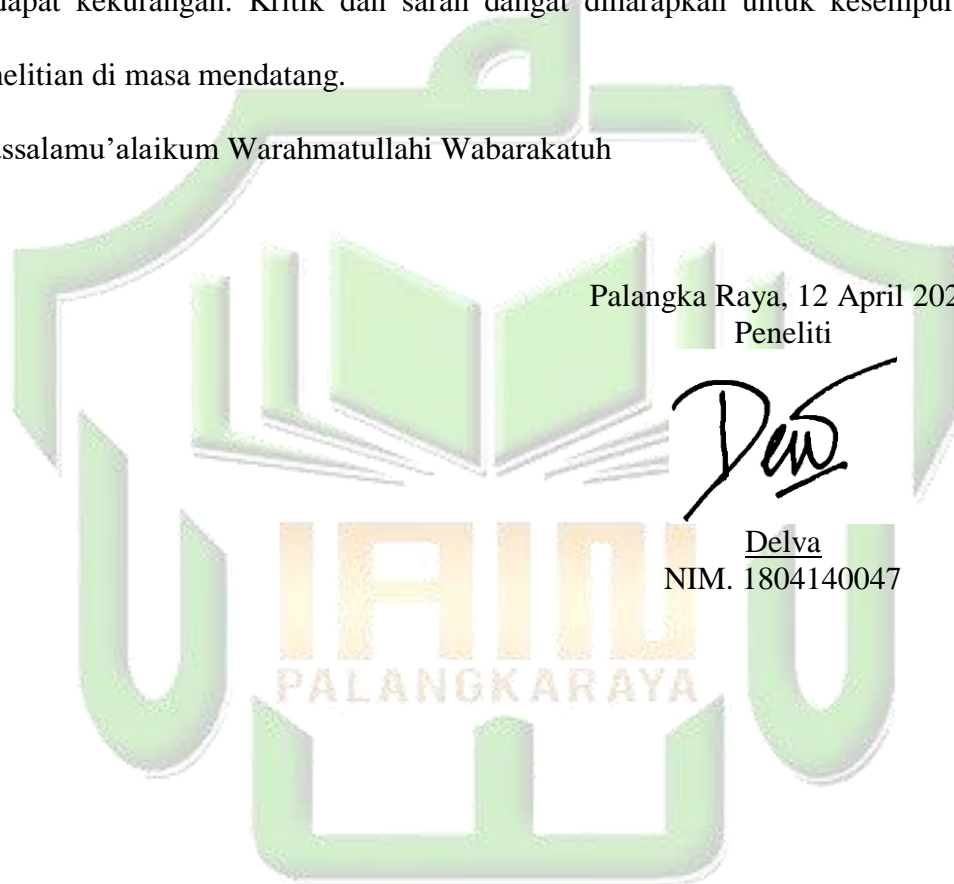
Palangka Raya, 12 April 2022

Peneliti



Delva

NIM. 1804140047



PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya ini dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2019”** benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 12 April 2022
Peneliti



Delva
NIM. 1804140047

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”

QS. An-Nisa (4) : 29



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur atas izin Allah SWT serta doa kedua orang tua, skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan penuh kerendahan hati karya ini peneliti persembahkan untuk:

1. Ayahanda Kusno dan Ibunda tercinta Luniah yang selalu mendukung serta mendoakan setiap langkah peneliti untuk kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, selalu memberikan nasihat, motivasi, perhatian serta kerja keras yang tidak ternilai harganya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah SWT.
2. Adik perempuan satu-satunya yang sangat peneliti sayangi Noer Azkia terima kasih atas doa, dukungan dan motivasinya selama ini. Semoga kita sama-sama sukses di dunia maupun di akhirat dan bisa membanggakan kedua orang tua.
3. Teman seperjuangan dari semester awal hingga akhir yaitu Nur Afifah Armadiyanti dan Puji Rahayu serta keluarga besar Akuntansi Syariah Kelas B angkatan 2018 yang selalu peneliti sayangi. Terima kasih atas doa dan dukungan kalian. Banyak kenangan baik suka maupun duka selama 4 tahun kita berproses di bangku perkuliahan. Semoga ilmu yang kita dapatkan selama ini bermanfaat ke depannya. Terima kasih atas segala kebaikan yang kalian beri, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dengan mempermudah setiap langkah dan proses mencapai kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN TEORI	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori dan Konsep.....	21
1. Kerangka Teori.....	21
a. Teori Pendapatan Asli Daerah.....	21
b. Teori Pajak Daerah.....	24
c. Teori Retribusi Daerah	29
d. Teori Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31
2. Kerangka Konsep	33

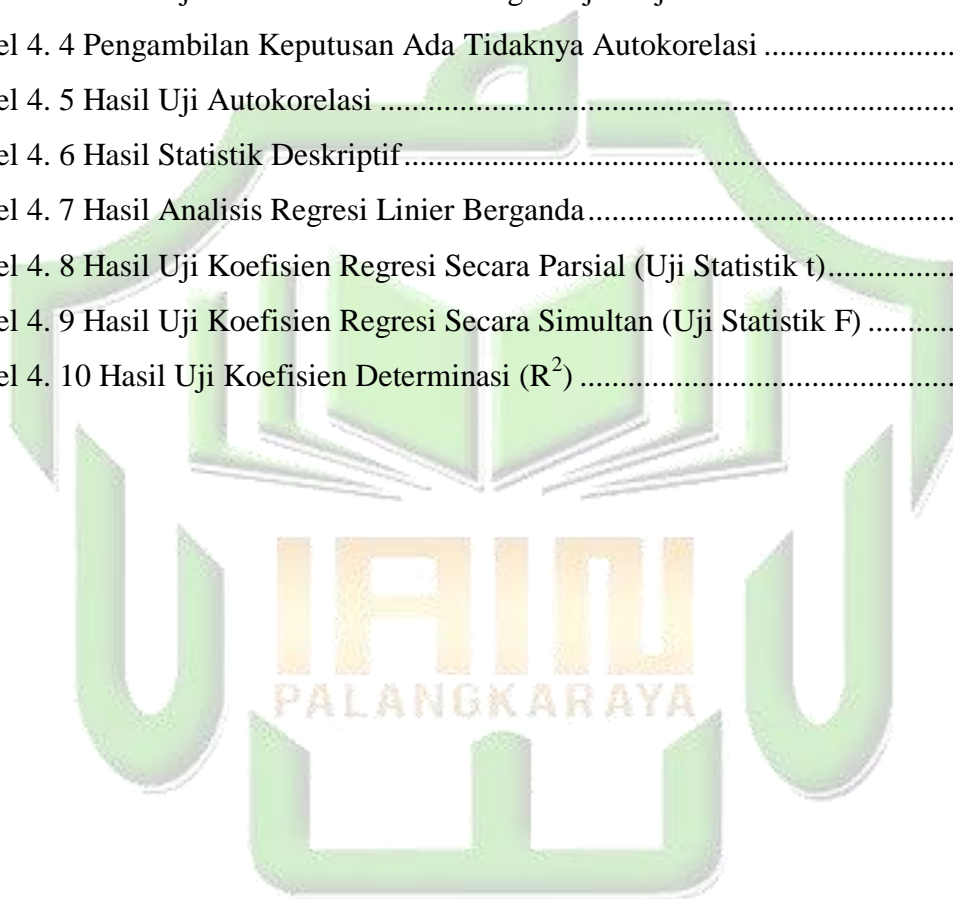
a.	Desentralisasi.....	33
b.	Pendapatan Daerah.....	34
c.	Kemanfaatan (<i>Utility</i>).....	38
C.	Kerangka Pikir.....	41
D.	Hipotesis Penelitian.....	43
BAB III	METODE PENELITIAN.....	47
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	47
B.	Definisi Operasional Variabel.....	48
C.	Waktu dan Tempat Penelitian.....	49
D.	Populasi dan Sampel Penelitian.....	50
1.	Populasi Penelitian.....	50
2.	Sampel Penelitian.....	51
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	52
F.	Teknik Pengolahan Data.....	52
G.	Uji Prasyarat Analisis.....	53
1.	Uji Asumsi Klasik.....	53
a.	Uji Normalitas.....	54
b.	Uji Multikolinearitas.....	55
c.	Uji Heteroskedastisitas.....	56
d.	Uji Autokorelasi.....	58
H.	Analisis Data.....	59
1.	Statistik Deskriptif.....	59
2.	Analisis Regresi Linier Berganda.....	59
I.	Sistematika Penulisan.....	62
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	64
B.	Penyajian Data.....	67
C.	Pembahasan.....	85
BAB V	PENUTUP.....	91
A.	Kesimpulan.....	91
B.	Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA	94
A. Buku.....	94
B. Jurnal dan Artikel	95
C. Skripsi dan Tesis.....	96
D. Internet.....	96
E. Sumber Lain	97
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	48
Tabel 3. 2 Waktu Penelitian	50
Tabel 4. 1 Hasil Uji Normalitas dengan Uji Kolmogorov-Smirnov	69
Tabel 4. 2 Hasil Uji Multikolinearitas.....	71
Tabel 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser	74
Tabel 4. 4 Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi	75
Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi	76
Tabel 4. 6 Hasil Statistik Deskriptif.....	77
Tabel 4. 7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	79
Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji Statistik t).....	81
Tabel 4. 9 Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji Statistik F)	83
Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimantan Tahun 2016-2019 (Miliar-Triliun)	4
Gambar 1. 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 (Miliar).....	5
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	41
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas dengan P-Plot	68
Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot.....	73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 2 Hasil Uji Normalitas dengan P-Plot	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 3 Hasil Uji Normalitas dengan Uji Kolmogorov-Smirnov.....	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 4 Hasil Uji Multikolinearitas	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot...	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser...	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 7 Hasil Uji Autokorelasi	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 8 Tabel Durbin-Watson (DW)	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 9 Hasil Statistik Deskriptif	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 10 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 11 Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji Statistik t)	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 12 t tabel	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 13 Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji Statistik F)	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 14 F tabel	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 15 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR SINGKATAN

1. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. BLUE : *Best Linear Unbiased Estimator*
4. BUMD : Badan Usaha Milik Daerah
5. BUMN : Badan Usaha Milik Negara
6. DJP : Direktorat Jenderal Pajak
7. H : Hijriah
8. IMB : Izin Mendirikan Bangunan
9. KM : Kilo Meter
10. KTP : Kartu Tanda Penduduk
11. M : Masehi
12. PAD : Pendapatan Asli Daerah
13. PP : Peraturan Pemerintah
14. SDM : Sumber Daya Manusia
15. SPSS : *Statistical Product and Service Solutions*
16. SPTPD : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
17. SRESID : *Studentized Residual*
18. UU : Undang-Undang
19. VIF : *Variance Inflation Factor*
20. ZPRED : *Standardized Predicted Value*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang berdasarkan peraturan daerah.¹ APBD merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. APBD berperan sebagai pendorong diarahkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang menjadi sebuah tantangan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Pengelolaan APBD sendiri difokuskan untuk optimalisasi fungsi dan manfaat pendapatan, belanja serta pembiayaan sehingga tercapainya sasaran agenda-agenda pembangunan tahunan. Terutama pada bagian pengelolaan pendapatan daerah yang akan terus diarahkan yaitu peningkatan pendapatan asli daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 34 Provinsi. Setiap provinsi terdiri dari kabupaten/kota. Indonesia juga merupakan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Banyaknya pulau di Indonesia terbukti dengan jumlah penduduk yang mencapai 270 juta lebih penduduk. Salah satunya pulau Kalimantan yang mendapatkan urutan ke 3 pulau terbesar di dunia dengan luas 743.330 km².² Provinsi di Kalimantan terbagi menjadi 5 yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Tentunya

¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

² Fahri Zulfikar, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5654126/5-pulau-terbesar-di-indonesia-di-antaranya-juga-terluas-di-dunia> (Diakses pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 07.47 WIB)

memberikan kontribusi pendapatan asli daerah yang berbeda sesuai dengan potensi di daerahnya masing-masing.

Melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah.³ Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka diharapkan pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan agar memberi kontribusi yang tinggi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah. Pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama pendapatan asli daerah.⁴ Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah dituntut untuk mampu meningkatkan dan menggali potensi PAD yang merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah untuk menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Dengan demikian, pendapatan

³ Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, h. 3.

⁴ Windhu Putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*, Depok: Rajawali Pers, 2018, h. 150-151.

asli daerah diharapkan menjadi sumber penerimaan pemerintah daerah yang memberikan kontribusi tinggi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dari PAD dan kemakmuran rakyatnya, sehingga kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD. Prinsipnya, bahwa semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD maka menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat.⁵ PAD tidak hanya sebatas berasal dari sumber pendapatan dan bantuan lainnya tapi juga berasal dari potensi di Kabupaten/Kota itu sendiri sehingga pemerintah daerah dapat secara bebas mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa adanya campur tangan kepentingan pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri.

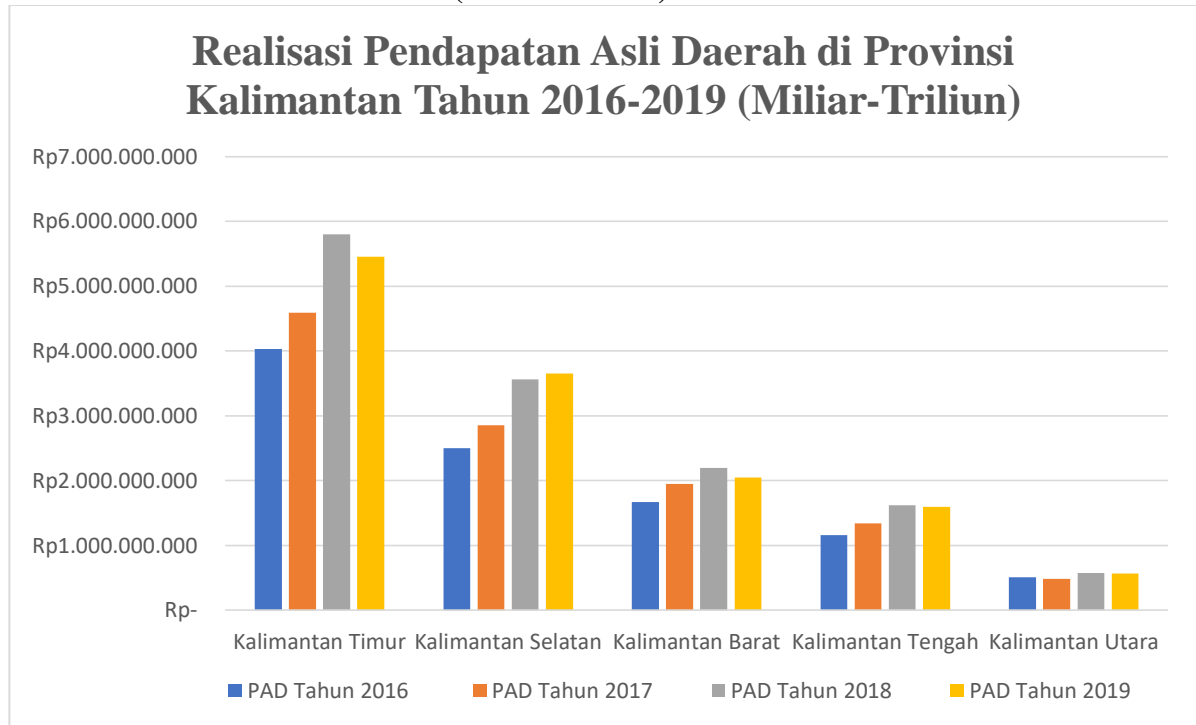
Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Provinsi terluas ke 2 di Indonesia setelah Papua dengan luas wilayah mencapai 153.564 km².⁶ Di antara 5 Provinsi di Kalimantan, peneliti menjadikan Kalimantan Tengah untuk mewakili Provinsi lainnya untuk melihat tingkat kemandirian Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 Kabupaten dan 1 Kota, dengan ibu Kota Palangka Raya. Kabupaten di Kalimantan Tengah terdiri dari Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas,

⁵ Surbakti Karo Karo, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Kabupaten Kota di Sumatera Utara", *Jurnal Telaah Akuntansi*, Vol. 17, No. 01, Juni 2014, h. 73-74.

⁶ Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, <https://dishut.kalteng.go.id/page/87/letak-batas-dan-luas-wilayah> (Diakses pada tanggal 26 Maret 2021, pukul 20.48 WIB)

Barito Selatan, Barito Utara, Sukamara, Lamandau, Seruyan, Katingan, Pulang Pisau, Gunung Mas, Barito Timur, dan Murung Raya.

Gambar 1. 1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimantan Tahun 2016-2019
(Miliar-Triliun)

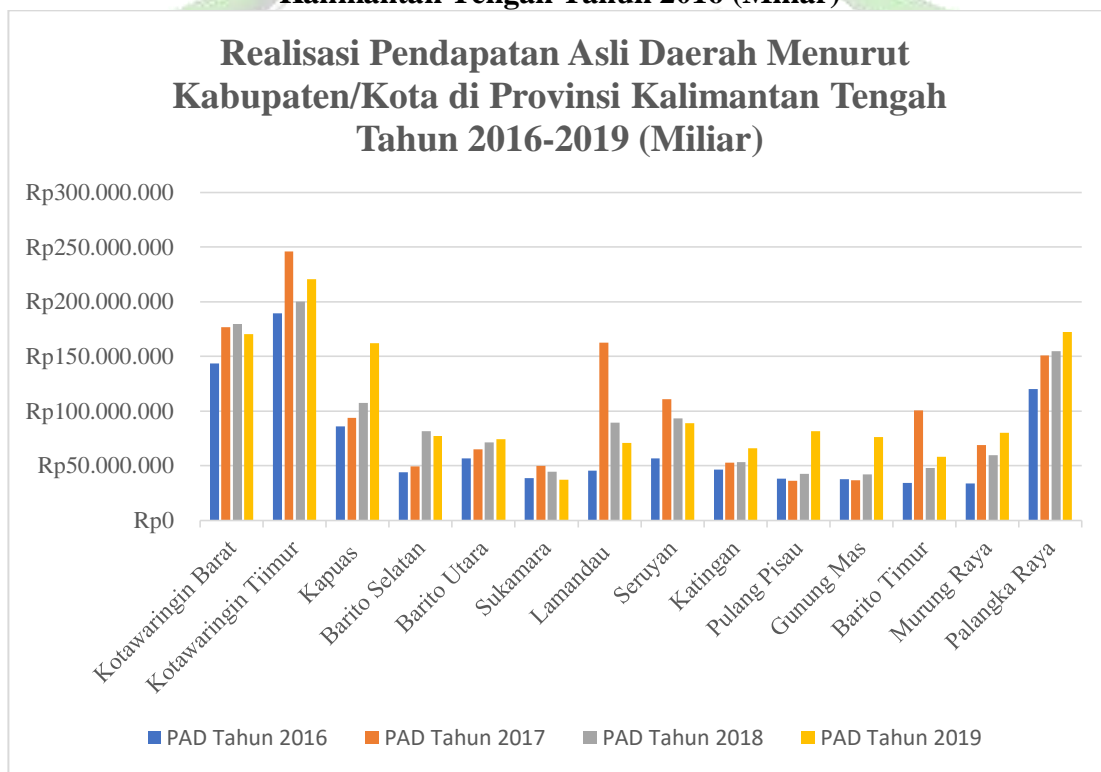


Sumber: www.bps.go.id

Selama 4 tahun terakhir, Kalimantan Tengah termasuk ke dalam salah satu penyumbang PAD terkecil yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp1,5 triliun dari ke 4 provinsi tertua yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Kemudian disusul oleh Kalimantan Utara sebesar Rp560 miliar. Posisi pertama penyumbang PAD terbesar di Kalimantan yaitu Kalimantan Timur sebesar Rp5,4 triliun. Posisi kedua yaitu Kalimantan Selatan sebesar Rp3,6 triliun dan posisi ketiga yaitu Kalimantan Barat sebesar Rp2,0 triliun. Hal ini yang menjadi alasan peneliti

dalam pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah, selain itu Kalimantan Tengah juga salah satu Provinsi tertua di antara 5 Provinsi di Kalimantan. Seharusnya bisa memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PAD nya, sedangkan Kalimantan Utara merupakan provinsi yang baru saja diresmikan sekitar 9 tahun yang lalu yaitu pada tanggal 25 Oktober 2012 yang tentunya perlu penyesuaian untuk menghasilkan PAD yang tinggi.

Gambar 1.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 (Miliar)



Sumber: <https://kalteng.bps.go.id>.

Selama tahun 2016, hanya terdapat 3 Kabupaten/Kota yang memperoleh PAD di atas Rp100,00 miliar yaitu Kotawaringin Timur Rp189,38 miliar, Kotawaringin

Barat Rp143,33 miliar dan Palangka Raya Rp119,96 miliar. Selain itu, Kabupaten/Kota yang lain hanya mampu menghasilkan PAD di bawah Rp100,00 miliar yaitu Kapuas Rp85,83 miliar, Seruyan Rp56,88 miliar, Barito Utara Rp56,81 miliar, Katingan Rp46,28 miliar, Lamandau Rp45,56 miliar, Barito Selatan Rp44,01 miliar, Sukamara Rp38,62 miliar, Pulang Pisau Rp38,07 miliar, Gunung Mas Rp37,47 miliar, Barito Timur Rp34,43 miliar dan PAD terendah terjadi di Kabupaten Murung Raya yaitu sebesar Rp33,85 miliar.⁷

Selama tahun 2017, hanya terdapat 6 Kabupaten/Kota yang memperoleh PAD di atas Rp100,00 miliar yaitu Kotawaringin Timur Rp245,98 miliar, Kotawaringin Barat Rp176,45 miliar, Lamandau Rp162,48 miliar, Palangka Raya Rp150,92 miliar, Seruyan Rp110,71 miliar, dan Barito Timur Rp100,37 miliar. Selain itu, Kabupaten/Kota yang lain hanya mampu menghasilkan PAD di bawah Rp100,00 miliar yaitu Kapuas Rp93,71 miliar, Murung Raya Rp68,67 miliar, Barito Utara Rp64,81 miliar, Katingan Rp52,99 miliar, Sukamara Rp49,84 miliar, Barito Selatan Rp49,29 miliar, Gunung Mas Rp36,50 miliar dan PAD terendah pada tahun 2017 terjadi di Kabupaten Pulang Pisau yaitu sebesar Rp36,20 miliar.⁸

Selama tahun 2018, hanya terdapat 4 Kabupaten/Kota yang memperoleh PAD di atas Rp100,00 miliar yaitu Kotawaringin Timur Rp200,12 miliar, Kotawaringin Barat Rp179,78 miliar, Palangka Raya Rp154,63 miliar, dan Kapuas Rp107,65

⁷ Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2016*, h. 32-33.

⁸ Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2017*, h. 31-32.

miliar. Selain itu, Kabupaten/Kota yang lain hanya mampu menghasilkan PAD di bawah Rp100,00 miliar yaitu Seruyan Rp93,25 miliar, Lamandau Rp89,39 miliar, Barito Selatan Rp81,42 miliar, Barito Utara Rp71,44 miliar, Murung Raya Rp59,79 miliar, Katingan Rp53,29 miliar, Barito Timur Rp47,82 miliar, Sukamara Rp44,57 miliar, Pulang Pisau Rp42,61 miliar dan PAD terendah pada tahun 2018 terjadi di Kabupaten Gunung Mas yaitu sebesar Rp42,14 miliar.⁹

Dilihat menurut wilayah Kabupaten/Kota, selama tahun 2019 hanya ada 4 Kabupaten/Kota yang memperoleh PAD di atas Rp100,00 miliar yaitu Kotawaringin Timur Rp220,44 miliar, Palangka Raya Rp172,36 miliar, Kotawaringin Barat Rp170,18 dan Kapuas Rp162,34. Selain itu, Kabupaten/Kota yang lain hanya mampu menghasilkan PAD di bawah Rp100,00 miliar yaitu Seruyan Rp88,98 miliar, Pulang Pisau Rp81,36 miliar, Murung Raya Rp80,12 miliar, Barito Selatan Rp77,33 miliar, Gunung Mas Rp76,21 miliar, Barito Utara Rp74,32 miliar, Lamandau Rp70,71 miliar, Katingan Rp66,04 miliar, Barito Timur Rp58,02 miliar dan PAD terendah pada tahun 2019 terjadi di Kabupaten Sukamara yaitu sebesar Rp37,38 miliar. Meskipun PAD hampir di semua Kabupaten/Kota cukup tinggi, namun dalam struktur APBD Kabupaten/Kota sebagian besar masih berasal dari dana perimbangan.¹⁰

⁹ Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2018*, h. 27.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2019*, h. 28-29.

Dari gambar data realisasi PAD 4 tahun terakhir di atas, dapat dilihat bahwa Kabupaten/Kota yang memperoleh PAD di atas Rp100,00 miliar pada tahun 2016 hanya terdapat 3 Kabupaten/Kota, pada tahun 2017 hanya terdapat 6 Kabupaten/Kota, pada tahun 2018 hanya terdapat 4 Kabupaten/Kota dan pada tahun 2019 hanya terdapat 4 Kabupaten/Kota. Dapat dikatakan bahwa hampir Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah belum mampu memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PAD nya.

Padahal yang diharapkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah harus lebih besar memberikan sumbangan PAD nya terhadap APBD karena semakin besar sumbangan yang diberikan maka menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat. Untuk itu sangat diharapkan pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah dapat menggali potensi yang ada di daerah nya masing-masing sehingga memberikan kontribusi yang besar bagi PAD dan dapat memaksimalkan pembiayaan serta pembangunan daerahnya, karena peranan PAD Kabupaten/Kota dalam pembangunan daerah ini penting, karena diperlukan sebagai dana pendamping untuk proyek pusat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas. Maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai permasalahan dengan judul Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2019.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu adanya batasan masalah dalam penelitian ini. Adapun batasan masalahnya yaitu:

1. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel yaitu pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah (Y). Peneliti tidak memasukkan 1 variabel ke dalam variabel independen yaitu lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dikarenakan realisasinya lebih tinggi dibandingkan ke 3 variabel yang peneliti masukkan. Alasan lainnya dikarenakan peneliti hanya ingin meneliti realisasi yang nilainya lebih rendah agar dapat ditingkatkan lagi realisasinya oleh pemerintah daerah.
2. Tahun pengamatan penelitian ini yaitu selama 4 tahun, dari tahun 2016 sampai dengan 2019, dikarenakan pada saat itu realisasi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah pada tahun 2021 masih belum dipublikasikan pada *website* Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2019?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2019?
3. Apakah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2019?
4. Apakah pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2019?
5. Manakah di antara pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang paling dominan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2019?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah penelitian, maka penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis pengaruh signifikan dan positif pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2019.
2. Menganalisis pengaruh signifikan dan positif retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2019.
3. Menganalisis pengaruh signifikan dan positif pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2019.
4. Menganalisis pengaruh signifikan dan positif pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2019.
5. Menganalisis di antara pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang paling dominan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2019.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan di lingkungan IAIN Palangka Raya khususnya Program Studi Akuntansi Syariah sebagai bahan pengkajian mengenai wawasan pengetahuan khususnya mengenai pendapatan asli daerah dan konsentrasi keilmuan akuntansi sektor publik.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan referensi bagi para peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

dan pendapatan asli daerah untuk menambah wawasan serta memberikan pengalaman yang sangat penting dan berguna kedepannya



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berasal dari kepustakaan, internet atau *website*, dan lain sebagainya, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian peneliti, yaitu:

1. Penelitian yang ditulis oleh Mardani Nursali, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang pada tahun 2017, dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji hipotesis dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan uji F sebesar 1400,036 dengan tingkat signifikansi 0,000 artinya terdapat pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, t hitung sebesar 23,034 dengan taraf signifikansi 0,000 artinya terdapat pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, t hitung sebesar 2,201 dengan taraf signifikansi 0,000 artinya terdapat

pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.¹¹

2. Penelitian yang ditulis oleh Intan Ratna Sari, Fakultas Ekonomi-Akuntansi Universitas Nusantara PGRI Kediri pada tahun 2018, dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017”. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Semua data diolah dengan menggunakan program SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan uji t diperoleh nilai signifikansi 0,000 artinya bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah, uji t diperoleh nilai signifikansi 0,002 artinya retribusi daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah, uji t diperoleh nilai signifikansi 0,000 artinya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah, dan uji t diperoleh nilai signifikansi 0,000 artinya lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan uji F diperoleh nilai signifikansi 0,000 artinya secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh

¹¹ Mardani Nursali, “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”, Skripsi Universitas Muhammadiyah: Palembang, 2017, h. 73.

signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017.¹²

3. Penelitian yang ditulis oleh Wulan Purnama Sari dan Miftahuljannah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pontianak pada tahun 2019, dengan judul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017)”. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik melalui program SPSS versi 20. Hasil penelitian uji t menunjukkan nilai t hitung $< t$ tabel 2,571 artinya bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, uji t menunjukkan nilai t hitung $-1,137 < t$ tabel 2,571 artinya bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Uji F menunjukkan nilai F hitung $15,165 > F$ tabel 5,79 pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Sintang tahun 2010-2017.¹³
4. Penelitian yang ditulis oleh Yusuf Hafandi dan Romandhon, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Qur’an pada tahun 2020, dengan judul

¹² Intan Ratna Sari, “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017”, Artikel Skripsi Universitas Nusantara: Kediri, 2018, h. 12-13.

¹³ Wulan Purnama Sari dan Miftahuljannah “Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017)”, E-Journal Equilibrium Manajemen, Vol. 5, No. 2, 2018, h. 17.

“Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo”. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian uji t menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,048 bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, uji t menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,452 bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, uji t menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,844 bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, uji t menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,018 bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.¹⁴

5. Penelitian yang ditulis oleh Hani Sri Mulyani dan Siska Ayu Ramdini, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka, pada tahun 2021, dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019”. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi

¹⁴ Yusuf Hafandi dan Romandhon, “Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo”, *Jurnal Of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, Vol. 3, No. 2, 2020, h. 188-189.

linear berganda dan uji hipotesis melalui program SPSS versi 21. Hasil penelitian uji t menunjukkan t hitung $2,112 > t$ tabel $2,03951$ bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah, uji t menunjukkan t hitung $1,843 < t$ tabel $2,03951$ bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah, uji t menunjukkan t hitung $0,657 < 2,03951$ bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah, uji t menunjukkan t hitung $4,089 > t$ tabel $2,03951$ bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pendapatan asli daerah. Uji F menunjukkan nilai F hitung $8,214 > 2,68$ bahwa pajak daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah.¹⁵

¹⁵ Hani Sri Mulyani dan Siska Ayu Ramdini, “Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019”, *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi*, Vol. 2 No. 2, 2021, h. 164-165.

Untuk memudahkan melihat persamaan, perbedaan, dan hasil penelitian dengan peneliti terdahulu, maka peneliti membuat tabel perbandingan penelitian terdahulu:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun, Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Manfaat Penelitian
1	Mardani Nursali, “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”. Pada tahun 2017, Kuantitatif.	Persamaan terletak pada variabel independen: pajak daerah dan retribusi daerah variabel dependen: pendapatan asli daerah.	Perbedaannya terletak pada waktu dan tempat penelitian, serta peneliti terdahulu tidak menggunakan variabel pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai variabel independen.	Dalam penelitian ini penggunaan teori pada variabel pajak daerah dan retribusi daerah.
2	Intan Ratna Sari, “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017”. Pada tahun 2018, Kuantitatif.	Persamaan terletak pada variabel independen: pajak daerah dan retribusi daerah variabel dependen: pendapatan asli daerah.	Perbedaannya terletak pada waktu dan tempat penelitian, serta peneliti terdahulu menggunakan variabel lain-lain pendapatan yang sah sebagai variabel independen.	Dalam penelitian ini penggunaan teori pada variabel pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
3	Wulan Purnama Sari dan	Persamaan terletak	Perbedaannya	Dalam penelitian ini

	Miftahuljannah, “Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017”. Pada tahun 2019. Kuantitatif.	pada variabel independen: pajak daerah dan retribusi daerah variabel dependen: pendapatan asli daerah.	terletak pada waktu dan tempat penelitian, serta peneliti terdahulu tidak menggunakan variabel pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai variabel independen.	penggunaan teori pada variabel pajak daerah dan retribusi daerah.
4	Yusuf Hafandi dan Romandhon “Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Disisahkan, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo”. Pada tahun 2020, Kuantitatif.	Persamaan terletak pada variabel independen: pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disisahkan variabel dependen: pendapatan asli daerah.	Perbedaannya terletak pada waktu dan tempat penelitian, serta peneliti terdahulu menggunakan variabel lain-lain pendapatan yang sah sebagai variabel independen.	Dalam penelitian ini penggunaan teori pada variabel pendapatan asli daerah.
5	Hani Sri Mulyani dan Siska Ayu Ramdini, “Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019”. Pada tahun 2021, Kuantitatif.	Persamaan terletak pada variabel independen: pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disisahkan variabel dependen: pendapatan asli daerah.	Perbedaannya terletak pada waktu dan tempat penelitian, serta peneliti terdahulu menggunakan variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai variabel independen.	Dalam penelitian ini penggunaan teori pada variabel pendapatan asli daerah.

Sumber: Diolah oleh Peneliti 2022

B. Kajian Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Pendapatan Asli Daerah

1) Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dihasilkan dari upaya daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber. Intensifikasi dilakukan pada sumber-sumber yang telah terbiasa ada di daerah dengan cara menyesuaikan tarif, perbaikan sistem pelayanan, penertiban objek-objek, dan pengenaan sistem denda bagi penunggak. Ekstensifikasi dilakukan untuk menambah sumber pendapatan yang biasa dengan menggali sumber-sumber baru yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁶

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah yang mempunyai tujuan untuk memberikan keluasaan kepada daerahnya masing-masing dalam menggali pendanaan pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan asas desentralisasi.

¹⁶ Sahya Anggara, *Administrasi Keuangan Negara*, Bandung: Pustaka Setia, 2016, h. 326.

2) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Seiring dengan otonomi daerah, pemerintah daerah kurang memaksimalkan pendapatan asli daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah seharusnya dioptimalkan. Baik dari segi jumlah nilai maupun dari sisi kuantitas hasil dari pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang terpenting untuk memaksimalkan pendapatan daerah ini yaitu pemerintah daerah tersebut harus bisa menggali potensi di daerahnya masing-masing sehingga mengurangi ketergantungan dari transfer dana pusat. Dengan begitu, Kabupaten/Kota dapat dikatakan memiliki tingkat kemandirian jika tidak terlalu bergantung dengan dana pemerintah pusat dan tentunya bisa meringankan belanja pemerintah pusat.

Upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dapat dilakukan antara lain:¹⁷

- 1) Menyesuaikan tarif pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan harga dan tingkat inflasi. Hal ini diperlukan untuk mengingat banyak sekali tarif pajak daerah tersebut telah ditetapkan sejak lama dan tidak pernah diubah. Akibatnya penetapan tersebut telah terlalu rendah dibandingkan dengan perkembangan harga;

¹⁷ Windhu Putra, *Tata Kelola*, h. 166-167.

- 2) Penetapan jenis pajak baru sesuai dengan UU yang berlaku terhadap beberapa potensi wajib pajak baru yang ada di daerah bersangkutan;
- 3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan PAD dengan melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan objek pajak tertentu;
- 4) Menciptakan lingkungan dan iklim yang kondusif bagi pengembangan investasi dan perekonomian kota serta memfasilitasi investor domestik dan asing bagi pelaksanaan investasi daerah;
- 5) Meningkatkan sistem insentif bagi pejabat dan seluruh personal yang terkait dalam mengelola pendapatan yang dilakukan;
- 6) Intensifikasi merupakan cara yang dilakukan dari dalam untuk meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah dengan memperbaiki kualitas pelayanan dan prosedur keuangan yang baik sebagai bentuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Meningkatkan kualitas organisasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak; dan
- 7) Ekstensifikasi berarti dilakukan dengan cara menggali sumber pendapatan daerah. Ekstensifikasi berarti usaha dalam bentuk

penambahan jumlah objek pajak yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah.

b. Teori Pajak Daerah

1) Definisi Pajak Daerah

Terdapat bermacam-macam definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli salah satunya menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani, pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹⁸

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, mendefinisikan pajak yaitu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.¹⁹ Pajak mempunyai peran penting bagi negara karena merupakan sumber pendapatan negara. Secara sederhana definisi pajak sendiri yaitu pungutan wajib dari rakyat

¹⁸ Dewi Kania Sugiharti dkk, *Hukum Pajak*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021, h. 2.

¹⁹ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, <https://www.pajak.go.id/id/pajak>. (Diakses pada tanggal 10 Agustus 2021, pukul 19.59 WIB)

yang kemudian diberikan kepada negara digunakan untuk membiayai semua pengeluaran seperti biaya pembangunan.

Menurut UU No. 18 Tahun 1997 pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran.²⁰

2) Jenis Pajak Daerah

Adapun jenis pajak daerah terbagi menjadi 2 yaitu:²¹

a) Jenis pajak provinsi terdiri dari yaitu:

- (1) Pajak kendaraan bermotor;
- (2) Bea balik nama kendaraan bermotor;
- (3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- (4) Pajak air permukaan; dan
- (5) Pajak rokok.

b) Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari yaitu:

²⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

²¹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2018, h. 15.

- (1) Pajak hotel;
- (2) Pajak restoran;
- (3) Pajak hiburan;
- (4) Pajak reklame;
- (5) Pajak penerangan jalan;
- (6) Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- (7) Pajak parkir;
- (8) Pajak air tanah;
- (9) Pajak sarang burung walet;
- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
dan
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

3) Bagi Hasil Pajak Provinsi

Hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:²²

- a) Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air dan bea balik nama kendaranan bermotor dan kendaraan di atas air diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen);

²² M. Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, h. 92-93.

- b) Hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
- c) Hasil penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air permukaan diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen); dan
- d) Hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Berkaitan dengan hasil penerimaan pajak kabupaten diperuntukkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan. Bagian daerah kabupaten/kota ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan daerah provinsi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar daerah kabupaten/kota sepenuhnya oleh daerah kabupaten/kota.

4) Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu:²³

a) *System Self Assesment*

Sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

²³ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2018, h. 9.

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b) *System Official Assesment*

Sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumentasi lain yang dipersamakan.

Ciri-ciri *System Official Assesment* yaitu:²⁴

- (1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus;
- (2) Wajib pajak bersifat pasif; dan
- (3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

c) *System With Holding*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

²⁴ Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Indeks, 2013, h. 14.

c. Teori Retribusi Daerah

Menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.²⁵

Berbeda dengan pajak pusat seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, retribusi yang dapat disebut sebagai pajak daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Retribusi daerah terbagi 3 dari yaitu:²⁶

- 1) Retribusi jasa umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari yaitu:

- a) Retribusi pelayanan kesehatan;
- b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- c) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil;

²⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

²⁶ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2018, h. 19.

- d) Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat;
 - e) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - f) Retribusi pelayanan pasar;
 - g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - i) Retribusi penggantian biaya cetak peta;
 - j) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 - k) Retribusi pengelolaan limbah cair;
 - l) Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
 - m) Retribusi pelayanan pendidikan; dan
 - n) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- 2) Retribusi jasa usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang tahun dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri dari yaitu:

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
- c) Retribusi tempat pelelangan;
- d) Retribusi terminal;

- e) Retribusi tempat khusus parkir;
 - f) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - g) Retribusi rumah potong hewan;
 - h) Retribusi pelayanan kepelabuhan;
 - i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 - j) Retribusi penyeberangan di air; dan
 - k) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- 3) Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan serta kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari yaitu:
- a) Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB);
 - b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - c) Retribusi izin gangguan;
 - d) Retribusi izin trayek; dan
 - e) Retribusi izin usaha perikanan.
- d. Teori Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dari pengelolaan

anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jika dari pengelolaan tersebut memperoleh laba maka dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari yaitu:²⁷

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

²⁷ Windhu Putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*, Depok: Rajawali Pers, 2018, h. 158.

2. Kerangka Konsep

a. Desentralisasi

1) Definisi Desentralisasi

Menurut Bachrul yang dikutip Burhanuddin dengan tesisnya, desentralisasi berarti memberikan sebagian dari wewenang pemerintah pusat kepada kepala daerah untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggungjawab serta menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan dengan otonomi.²⁸

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁹ Sumber keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Sumber keuangan daerah bersumber dari pendapatan daerah di antaranya yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang berasal dari potensi di daerahnya sendiri yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain

²⁸ Burhanudin, “*Analisis Kinerja dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonosobo*”, Tesis STIE Widya Wiwaha: Yogyakarta, 2017, h. 7.

²⁹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000, <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=450> (Diakses pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 08.49. WIB)

pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah diharapkan mampu menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah, semakin banyak kebutuhan daerah yang mampu dibiayai oleh pendapatan asli daerah maka semakin tinggi kualitas yang otonomi daerahnya. Sehingga daerah tersebut dapat dikatakan memiliki tingkat kemandirian dalam keuangan daerahnya dan tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

b. Pendapatan Daerah

Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mendefinisikan pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Berdasarkan PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.³⁰ Dalam pelaksanaan desentralisasi, penerimaan daerah terbagi menjadi 2 yaitu pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah sendiri berasal dari 3 sumber yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan pembiayaan berasal dari 4 sumber

³⁰ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-pendapatan-daerah> (Diakses pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 08.51 WIB)

yaitu sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan yang dipisahkan.

Pertama, Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang didapatkan dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah berasal dari empat sumber yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.³¹ Kedua, dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang artinya dana perimbangan ini berasal dari dana pusat yang ditransferkan ke daerah. Dana perimbangan berasal dari tiga sumber yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.³² Ketiga, lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas hibah atau penerimaan dari daerah Provinsi atau daerah kabupaten/kota, dan pemerintahan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk ke dalam dana darurat untuk keperluan mendesak seperti terjadinya bencana alam yang dinyatakan oleh pemerintah pusat sebagai bencana alam, sehingga diberilah dana darurat tersebut. Prosedur serta

³¹ M. Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan*, h. 80-81.

³² *Ibid*, h. 88.

tata cara penyaluran dana darurat pun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.³³

1) Pendapatan Asli Daerah dalam Pandangan Islam

Pemerintah dan masyarakat pada dasarnya merupakan dua institusi yang memiliki fungsi dasar yang sama, yaitu untuk merealisasikan semua kewajiban publik dan kewajiban kolektif untuk mewujudkan *falah*.³⁴ Berdasarkan kehidupan di dunia *falah* dapat diartikan sebagai kebebasan berkeinginan, kelangsungan hidup, kekuatan bahkan kehormatan. Sementara untuk kehidupan akhirat *falah* dapat diartikan sebagai kelangsungan hidup, kesejahteraan hidup dan lainnya. Islam sudah menentukan apa saja sektor penerimaan negara ataupun pemerintah melalui *zakat*, *ghanimah*, *khumus*, *fai*, *jizyah*, *kharaj*, *khums*, *wakaf*, *infak*, serta *sedekah* dan lainnya.

Pendapatan jika diklasifikasikan ada yang bersifat rutin yaitu *zakat*, *jizyah*, *kharaj*, *ushr*, *infak*, dan *sedekah*. Sementara yang bersifat temporer yaitu *ghanimah*, *fai*, serta harta yang tidak ada pewarisnya.³⁵

³³ *Ibid.*

³⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2014, h. 446.

³⁵ *Ibid.*

Dalam Q.S. Al-An'Am ayat 165 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ
الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-An'am 6:165).³⁶

Kalimat “penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat”, ditujukan kepada penguasa/pemerintah dalam suatu negara atau daerah atas amanah yang mereka emban untuk kepentingan rakyat. Ayat di atas menjelaskan tentang kemandirian keuangan (baik dari segi penerimaan atau pengeluaran) suatu daerah dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan kemampuan para pengelolanya baik negara, provinsi maupun daerah.

2) Kaidah Syariah yang Berkaitan dengan Kebijakan Pajak

Sebenarnya dalam ajaran agama Islam tidak membolehkan pemerintah untuk mengambil sebagian harta yang dimiliki orang secara paksa seperti yang tertuang dalam Undang-Undang konteks

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: 2006.

ekonomi modern. Walaupun sesulit-sulitnya kehidupan Rasulullah SAW di Madinah, sungguh beliau tidak pernah menentukan adanya pungutan pajak sebagai sebuah kebijakan. Pada sektor ekonomi modern, pajak merupakan satu-satunya sektor pendapatan yang sangat berpengaruh karena terpenting dan terbesar alasannya dikarenakan pendapatan tersebut digunakan untuk *publics goods* yang mempunyai tujuan untuk redistribusi, penstabilan serta pendorong pertumbuhan ekonomi.³⁷ Seandainya, jika pungutan pajak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam maka kaidahnya harus berdasarkan pada kaidah *a'dalah* dan kaidah *dharurah* yang berarti pungutan pajak tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang mampu atau tergolong kaya serta benar-benar digunakan untuk pembiayaan yang sangat diperlukan karena pemerintah sama sekali tidak mempunyai sektor pemasukan lainnya.

c. Kemanfaatan (*Utility*)

Agar pengelolaan pajak selaras dengan otonomi daerah, maka pemanfaatannya harus digunakan untuk yang bersangkutan dengan sektor pajak. Orang yang membayar pajak harus dapat merasakan manfaat atas pembayarannya dan diharapkan muncul kesadaran untuk membayar secara sukarela. Pemungutan pajak daerah harus dapat

³⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2014, h. 447.

mempertimbangkan kemanfaatannya bagi pemerintah di daerah tersebut. Sehingga pemungutan pajak daerah harus melihat dari dua sisi yaitu sisi daya guna bagi pemerintah daerah dan masyarakat di daerah tersebut.

5 tolak ukur untuk menilai apakah pendapatan asli daerah, pajak daerah, retribusi daerah yang ada sudah layak, salah satunya adalah berkaitan dengan asas kemanfaatan. Ke 5 tolak ukur tersebut adalah sebagai berikut:³⁸

- 1) Hasil (*Yield*): memadai tidaknya hasil suatu pajak daerah dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayai, yakni stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut;
- 2) Keadilan (*Equality*): dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada kelompok yang tidak memiliki sumber daya ekonomi;

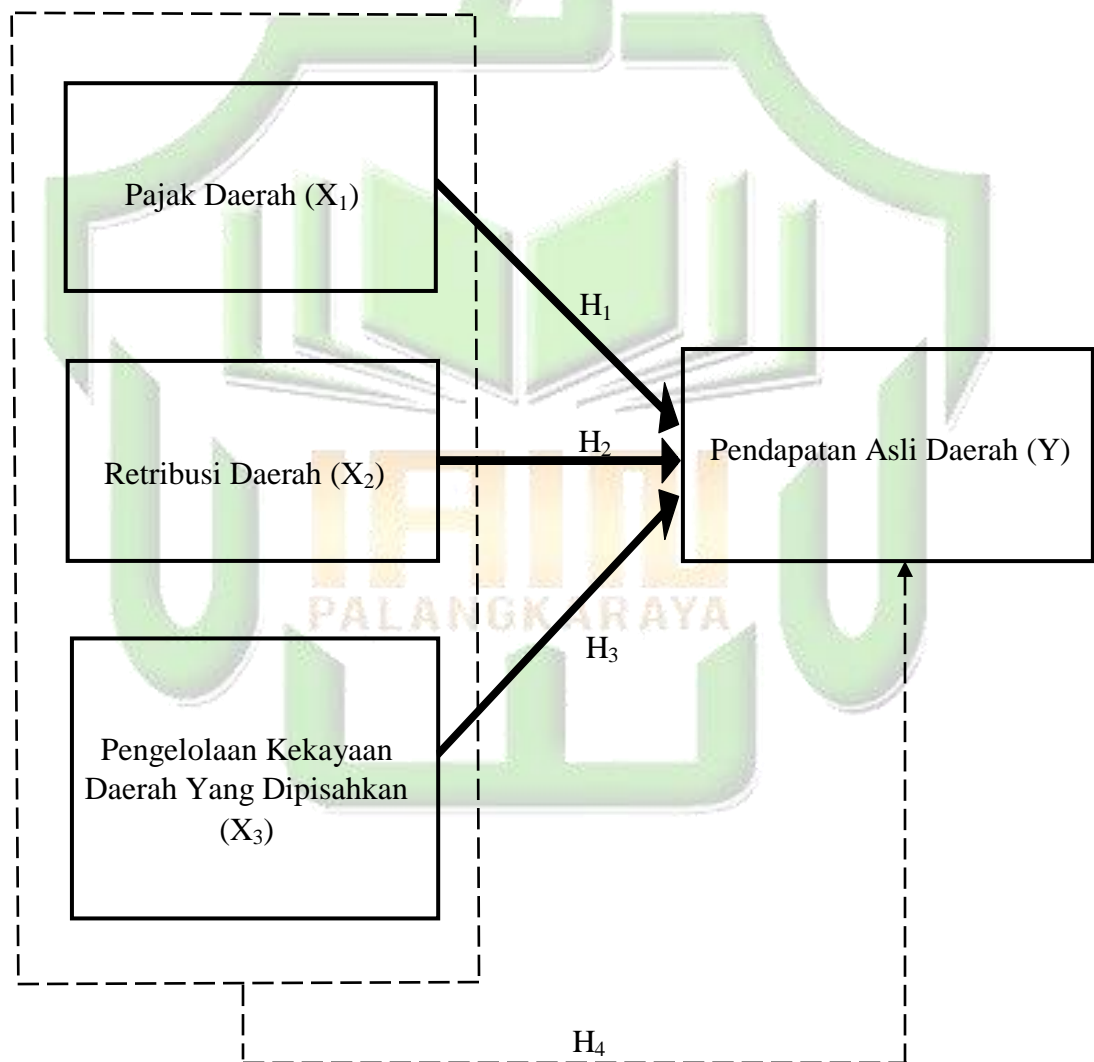
³⁸ Windhu Putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*, Depok: Rajawali Pers, 2018, h. 155.

- 3) Daya guna ekonomi (*Economi Efficiency*): pajak hendaknya mendorong atau tidak menghambat penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan produsen menjadi salah arah atau memperkecil beban pajak;
- 4) Kemampuan melaksanakan (*Abibility to Implent*): suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemampuan tata usaha; dan
- 5) Kecocokan atau sumber penerimaan daerah (*Suitablity a Local Revenue Source*): berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak.

C. Kerangka Pikir

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2019

Gambar 2. 1
Kerangka Pikir



Sumber: Diolah oleh Peneliti 2022

Keterangan:

X_1 = Pajak daerah

X_2 = Retribusi daerah

X_3 = Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

X_4 = Pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Y = Pendapatan asli daerah

Variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang mungkin menyebabkan, memengaruhi, atau berefek pada *outcome* atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbul variabel dependen (terikat). Variabel ini dikenal dengan istilah variabel *treatment*, *manupulated*, *antecedent*, atau *predictor*.³⁹ Variabel independen penelitian ini yaitu pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3). Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang bergantung pada variabel bebas. Variabel ini merupakan *outcome* atau hasil dari pengaruh variabel bebas. Istilah lain untuk variabel terikat adalah variabel *criterion*, *outcome*, *effect*, dan *response*.⁴⁰ Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah (Y).

³⁹ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi 4*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, h. 70.

⁴⁰ *Ibid.*

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.⁴¹

Berdasarkan hubungan antara tujuan penelitian dan kerangka pemikiran teoritis terhadap rumusan masalah penelitian ini, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi tanpa adanya imbalan langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah serta termasuk ke dalam salah satu sumber pendapatan asli daerah. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hani Sri Mulyani dan Siska Ayu Ramdini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah.⁴²

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2018, h. 134-135.

⁴² Hani Sri Mulyani dan Siska Ayu Ramdini, "*Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan*

H₁: Pajak daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah.

2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah juga salah satu sumber dari pendapatan asli daerah yang tentunya juga digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Intan Ratna Sari menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah.⁴³

H₂: Retribusi daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah.

3. Pengaruh Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai serta

Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019”, Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi, Vol. 2 No. 2, 2021, h. 151.

⁴³ Intan Ratna Sari, “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017”, Artikel Skripsi Universitas Nusantara: Kediri, 2018, h. 3.

dipertanggungjawabkan sendiri. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Intan Ratna Sari menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah.⁴⁴

H₃: Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah.

4. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hani Sri Mulyani dan Siska Ayu Ramdini bahwa pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah.⁴⁵

H₄: Pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah.

5. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Yang Paling Dominan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

⁴⁴ Intan Ratna Sari, "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017", Artikel Skripsi Universitas Nusantara: Kediri, 2018, h. 3.

⁴⁵ Hani Sri Mulyani dan Siska Ayu Ramdini, "Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019", Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi, Vol. 2 No. 2, 2021, h. 151.

H₅: Pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang paling dominan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini disebut sebagai metode *positivistik* karena berlandaskan pada *filsafat positivisme*. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.⁴⁶ Dalam penelitian kuantitatif, hakikat hubungan di antara variabel-variabel selanjutnya akan dianalisis dengan alat uji statistik serta menggunakan teori yang objektif.⁴⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan melihat hubungan antar variabel atau pengaruh-pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Jenis penelitian ini, dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Pengolahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji regresi linier berganda.⁴⁸

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2018, h. 35.

⁴⁷ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian*, h. 12.

⁴⁸ *Ibid*, h. 19.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan variabel penelitian yang dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum melakukan analisis, menentukan instrumen. Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang mengukur variabel. Definisi operasional bukan hanya sekedar petunjuk tentang cara mengukur suatu variabel. Akan tetapi, definisi operasional juga merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama.⁴⁹

Agar tidak menimbulkan pemahaman yang saling berbeda terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3. 1
Definisi Operasional Variabel

Nama Variabel	Definisi Operasional
Pajak Daerah (X ₁)	Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah digolongkan menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. ⁵⁰
Retribusi Daerah (X ₂)	Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi. Sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dipungut oleh

⁴⁹ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*, Yogyakarta: Quadrant, 2021, h. 65.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

	pemerintah daerah. Retribusi daerah digolongkan menjadi tiga yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. ⁵¹
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X ₃)	Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai serta dipertanggungjawabkan sendiri. Jenis pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan digolongkan menjadi tiga yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. ⁵²
Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Sumber pendapatan asli daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. ⁵³

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan selama dua bulan yakni pada bulan Desember 2021 sampai dengan Februari 2022. Tempat penelitian ini dilakukan di Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan Kapten Piare Tandean No. 6, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan *website* <https://kalteng.bps.go.id>, yang mempublikasikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan

⁵¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁵² Windhu Putra, *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*, Depok: Rajawali Pers, 2018, h. 158.

⁵³ *Ibid*, h. 150.

daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah 13 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kalimantan Tengah selama 4 tahun, yaitu dari tahun 2016-2019.

Tabel 3. 2
Waktu Penelitian

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Penelitian							
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1	Proses Pembuatan Proposal								
2	Proses Bimbingan Proposal dan Seminar								
3	Proses Penelitian dan Pembuatan Skripsi								
4	Proses Bimbingan Skripsi dan Ujian Skripsi								

Sumber: Diolah oleh Peneliti 2022

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵⁴ Populasi dalam penelitian ini yaitu data realisasi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah 13 kabupaten dan

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 148.

1 kota di Provinsi Kalimantan Tengah selama 4 tahun yaitu dari tahun 2016-2019.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁵⁵ Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan *convenience sampling* yang berarti sampel yang dipilih berdasarkan kemudahan dan ketersediaannya.⁵⁶ Artinya sampel yang dipilih peneliti berdasarkan sampel yang ada di tempat dan waktu yang tepat yaitu dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah yang mempublikasikan realisasi PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2019 dengan *website* <https://kalteng.bps.go.id> sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 56 sampel.

Keterangan:

Kabupaten/Kota = 13 Kabupaten dan 1 Kota = 14 Kabupaten/Kota

Tahun Pengamatan 2016-2019 = 4 tahun

Jadi, $14 \times 4 = 56$ sampel

⁵⁵ *Ibid*, h. 149.

⁵⁶ John W. Creswell, *Research Design*, h. 211.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan kegiatan peneliti dalam menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, dokumen, peraturan-peraturan, gambar, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.⁵⁷ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini berupa laporan realisasi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang dipublikasikan melalui Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dengan *website* <https://kalteng.bps.go.id>.

F. Teknik Pengolahan Data

Penggunaan pengolahan data sangat penting dalam melakukan analisis data penelitian kuantitatif. Pengolahan data merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data yang sudah diperoleh setelah melakukan penelitian. Berikut langkah-langkah pengolahan data penelitian yaitu sebagai berikut:⁵⁸

1. Tahap mengumpulkan data, dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa realisasi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi

⁵⁷ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018, h.75.

⁵⁸ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian*, h. 93-94.

Kalimantan Tengah tahun 2016-2019 yang diunduh melalui *website* Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (<https://kalteng.bps.go.id>);

2. Tahap penyuntingan, yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan data, kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan terhadap data yang diperoleh sehingga data yang diperoleh valid dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan;
3. Tahap tabulasi data, yaitu mencatat atau memasukkan data ke dalam tabel induk penelitian;
4. Tahap *cleaning*, merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang sudah di *entry*, ada kesalahan atau tidak karena kesalahan kemungkinan terjadi pada saat *mentry* ke komputer; dan
5. Tahap pengujian hipotesis, merupakan tahap pengujian terhadap proporsi-proporsi yang dibuat tersebut ditolak atau diterima. Atas dasar pengujian hipotesis inilah keputusan dibuat.

G. Uji Prasyarat Analisis

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji yang dilakukan sebelum pemrosesan data regresi (baik sederhana atau berganda) agar persamaan yang dihasilkan memenuhi kaidah *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Jika uji asumsi klasik tidak dilakukan sebelum pemrosesan data, persamaan yang dihasilkan

diragukan kemampuannya dalam menghasilkan predikat yang akurat.⁵⁹ Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.⁶⁰ Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara uji normalitas dengan P-Plot dan uji normalitas dengan uji *Kolgomorov-Smirnov Test* (uji K-S). Dasar Pengambilan keputusan uji normalitas dengan P-Plot yaitu:⁶¹

- 1) Apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis residual, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Apabila data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis residual, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

⁵⁹ Agung Budi Santoso, *Tutorial & Solusi Pengolahan Data Regresi*, Maluku: Agung Budi Santoso, 2018, h. 6.

⁶⁰ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*, Semarang: Undip, 2018, h. 161.

⁶¹ Firdaus, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Analisis Regresi IBM SPSS Statistics Version 26.0*, Bengkalis: Dotplus Publisher, 2021, h. 32.

Uji K-S dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi atau *Asymp. Sig (2-tailed)*. Sebelumnya perlu ditentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian yaitu:⁶²

H_1 : Data terdistribusi secara normal

H_a : Data tidak terdistribusi secara normal

Apabila nilai probabilitas signifikansi lebih dari $\alpha = 0,05$, maka data terdistribusi secara normal. Apabila nilai probabilitas signifikansi kurang dari $\alpha = 0,05$, maka data tidak terdistribusi secara normal, maka perlu transformasi logaritma (Ln) terhadap regresi, sehingga data yang didapat terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.⁶³

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah dengan cara melihat nilai *tolerance* dan nilai

⁶² I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian*, h. 209-210.

⁶³ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis*, h. 107.

Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih dari 0,10 berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas.⁶⁴

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data *cross-sectional* mengandung heteroskedastisitas, karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar).⁶⁵

Uji heteroskedastisitas memiliki cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel bebas yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X

⁶⁴ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian*, h. 211.

⁶⁵ Nawari, *Analisis Regresi dengan MS. Excel 2007 dan SPSS 17*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010, h. 227.

adalah residual (Y prediksi Y sesungguhnya) yang telah di *studentized*. Dasar analisis dalam grafik uji heteroskedastisitas adalah yang pertama dengan melihat, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Dasar analisis yang kedua adalah jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y , maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis dengan menggunakan plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan karena jumlah pengamatan memengaruhi hasil plotting. Semakin sedikit jumlah pengamatan semakin sulit menginterpretasikan hasil grafik plot. Oleh sebab itu, diperlukan uji statistik yang dapat menjamin keakuratan hasil. Salah satu uji statistik yang dapat digunakan adalah uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen dengan persamaan regresi:

$$|U_t| = \alpha + \beta X_t + v_t$$

Jika variabel independen signifikan secara statistik memengaruhi variabel dependen, ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Apabila probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%, tidak ada

satu pun variabel independen yang signifikan secara statistik memengaruhi variabel nilai Absolut Ut (AbsUt).⁶⁶

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya.⁶⁷

Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan cara uji Durbin-Watson (DW test). Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen. Hipotesis yang diuji adalah:⁶⁸

H_0 : tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_a : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

⁶⁶ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian*, h. 211-213.

⁶⁷ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis*, h. 111.

⁶⁸ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian*, h. 213-214.

H. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk memproses hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Data tersebut dikumpulkan dan diolah menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum (nilai tertinggi), minimum (nilai terendah), *sum*, *range*, *kurtosis* dan *swewness* (kemencengan distribusi).⁶⁹

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi besarnya variabel terikat dengan menggunakan data variabel bebas secara bersamaan yang sudah diketahui besarnya.

Adapun persamaan regresi linier berganda yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Pendapatan asli daerah

a = Konstanta

b = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel X_1 , X_2 , X_3

X_1 = Pajak daerah

⁶⁹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis*, h. 19.

X_2 = Retribusi daerah

X_3 = Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

e = Error

a. Pengujian Hipotesis

Untuk mengambil keputusan atas suatu hipotesis, peneliti melakukan pengujian-pengujian berikut, yaitu:

1) Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji Statistik t)

Uji t merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh masing-masing (parsial) variabel independen terhadap variabel dependen. Taraf signifikansinya adalah 5%, kaidah pengambilan keputusan dalam uji t yaitu:

H_0 : Tidak ada pengaruh antara variabel x terhadap variabel y

H_a : Ada pengaruh antara variabel x terhadap variabel y

Kriteria:

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, H_0 diterima dan H_a ditolak.

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, H_0 ditolak dan H_a diterima⁷⁰

2) Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji Statistik F)

Uji F merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh variabel independen secara keseluruhan (simultan) terhadap variabel dependen, kaidah pengambilan keputusan dalam Uji F yaitu:

⁷⁰ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian*, h. 99-101.

H_0 : Tidak memenuhi kelayakan

H_a : Memenuhi kelayakan

Kriteria:

Jika F hitung $<$ F tabel, H_0 diterima dan H_a ditolak

Jika F hitung $>$ F tabel, H_0 ditolak dan H_a diterima⁷¹

3) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

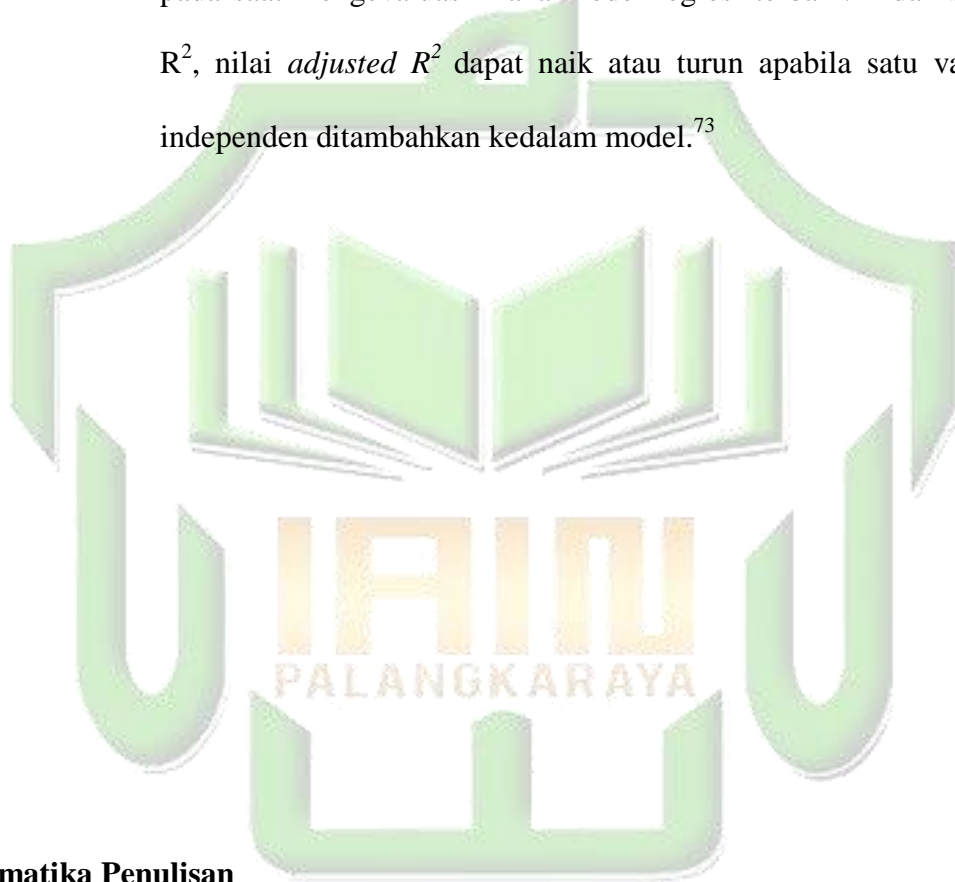
Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.⁷²

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan

⁷¹ *Ibid*, h. 100.

⁷² Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis*, h. 97.

kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted R²* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai *adjusted R²* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model.⁷³



I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian ini, maka peneliti membaginya dalam beberapa bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

⁷³ *Ibid.*

Pokok pembahasan terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan penelitian, dan kegunaan penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI

Terdiri dari penelitian terdahulu, kajian teori dan konsep, kerangka pikir, dan hipotesis penelitian. Penelitian terdahulu yang peneliti bandingkan dengan penelitian ini ada lima penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Mengulas tentang pendekatan dan jenis penelitian, definisi operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, uji prasyarat analisis, analisis data dan sistematika penulisan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 tahun 1960 tentang statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan di bawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Materi yang merupakan muatan baru dalam UU nomor 16 tahun 1997, antara lain:⁷⁴

- a. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS;

⁷⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, <https://www.bps.go.id/menu/1/informasi-umum.html> (Diakses pada tanggal 13 Desember 2021, pukul 10.29 WIB).

- b. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan;
- c. Sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien;
- d. Dibentuknya forum masyarakat statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut:⁷⁵

- a. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder;
- b. Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya dalam membangun sistem perstatistikan nasional;
- c. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik;
- d. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan lain untuk kepentingan perkembangan statistik.

⁷⁵ *Ibid.*

Badan Pusat Statistik memiliki visi dan misi sebagai berikut:⁷⁶

a. Visi

Penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia Maju

b. Misi

Peningkatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Pembangunan yang merata dan berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional;
- 2) Membina K/L/D/I melalui sistem statistikn nasional yang berkesinambungan;
- 3) Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk mewujudkan sistem statistik nasioanal; dan
- 4) Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

2. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang ada di Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah tahun pengamatan 2016, 2017, 2018 dan 2019. Kalimantan Tengah merupakan salah

⁷⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, <https://www.bps.go.id/menu/1/visi-dan-misi.html> (Diakses pada tanggal 13 Desember 2021, pukul 10.29 WIB).

satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan. Kalimantan Tengah mempunyai 13 Kabupaten dan 1 Kota. Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ibu kota Palangka Raya, terletak antara $0^{\circ}45'$ Lintang Utara s.d. $3^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan 111° s.d. 116° Bujur Timur.⁷⁷

B. Penyajian Data

1. Uji Asumsi Klasik

Model regresi yang baik disyaratkan harus memenuhi tidak adanya masalah pada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi residual berdistribusi normal atau tidak, dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan P-Plot dan uji normalitas dengan uji *Kolgomorov-Smirnov* (uji K-S). Dasar Pengambilan keputusan uji normalitas dengan P-Plot yaitu:⁷⁸

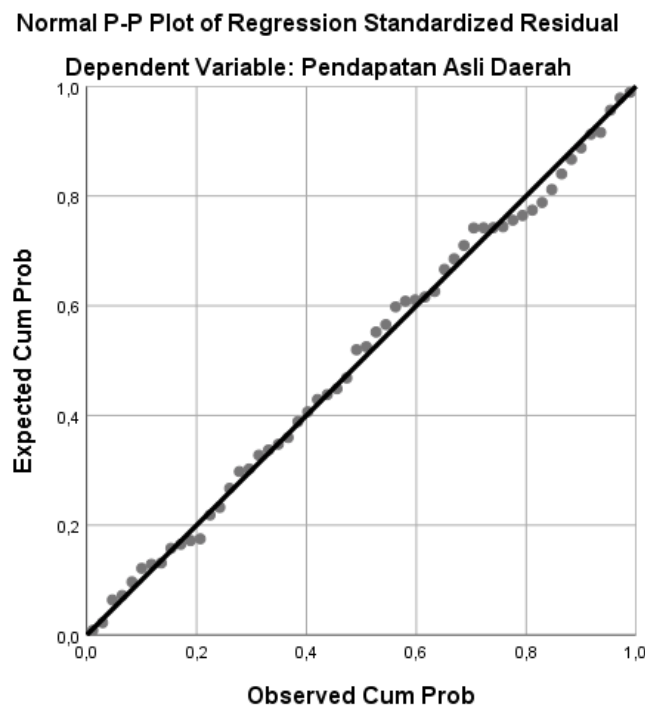
⁷⁷ Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, <https://dishut.kalteng.go.id/page/87/letak-batas-dan-luas-wilayah> (Diakses pada tanggal 17 Desember 2021, pukul 21.16 WIB).

⁷⁸ Firdaus, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Analisis Regresi IBM SPSS Statistics Version 26.0*, Bengkulu: Dotplus Publisher, 2021, h. 32.

- 1) Apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis residual, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Apabila data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis residual, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Berikut gambar 4.1 hasil uji normalitas dengan P-Plot dalam penelitian ini:

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas dengan P-Plot



Sumber: Output SPSS Versi 25, Diolah oleh Peneliti 2022

Berdasarkan gambar 4.1 dapat dilihat bahwa data telah berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan gambar tersebut sudah memenuhi

dasar pengambilan keputusan yaitu data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis residual, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji K-S dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi atau *Asymp. Sig (2-tailed)*. Apabila nilai probabilitas signifikansi lebih dari $\alpha = 0,05$, maka data terdistribusi secara normal. Apabila nilai probabilitas signifikansi kurang dari $\alpha = 0,05$, maka data tidak terdistribusi secara normal. Berikut tabel 4.1 hasil uji normalitas dengan *One-sample Kolmogorov-Smirnov Test* (uji K-S) dalam penelitian ini:

Tabel 4. 1
Hasil Uji Normalitas dengan Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,09867148
Most Extreme Differences	Absolute	,051
	Positive	,046
	Negative	-,051
Test Statistic		,051
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS Versi 25, Diolah oleh Peneliti 2022

Berdasarkan tabel 4.1 hasil pengujian uji normalitas dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* di atas menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* 0,200 lebih besar dari 0,05 (5%). Maka dapat disimpulkan bahwa data pada variabel di atas berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel dependen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen dan diregres variabel independen lainnya. Jadi, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $=1/\text{Tolerance}$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 .⁷⁹ Jika nilai *tolerance* lebih dari 0,10 berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%.⁸⁰ Berikut tabel 4.2 hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini:

⁷⁹ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis*, h. 107-108.

⁸⁰ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian*, h. 211.

Tabel 4. 2
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,526	,842		,625	,535		
Pajak Daerah	,205	,052	,259	3,943	,000	,723	1,384
Retribusi Daerah	,473	,040	,762	11,950	,000	,764	1,310
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	,370	,105	,203	3,524	,001	,939	1,065

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Output SPSS Versi 25, Diolah oleh Peneliti 2022

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari pajak daerah 0,723 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF pada variabel pajak daerah 1,384 lebih kecil dari 10 maka tidak terdapat gejala multikolinearitas. Nilai *tolerance* pada retribusi daerah 0,764 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF pada variabel retribusi daerah 1,310 lebih kecil dari 10 maka tidak terdapat gejala multikolinearitas. Nilai *tolerance* pada variabel pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 0,939 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF pada pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 1,065 lebih kecil dari 10 maka tidak terdapat gejala multikolinearitas. Dapat dilihat pada tabel 4.2 bahwa tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 dan *variance inflation factor* (VIF) lebih dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tiga variabel independen yaitu pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

(X_3) tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen karena tidak ada korelasi atau hubungan yang kuat antara ketiga variabel tersebut.

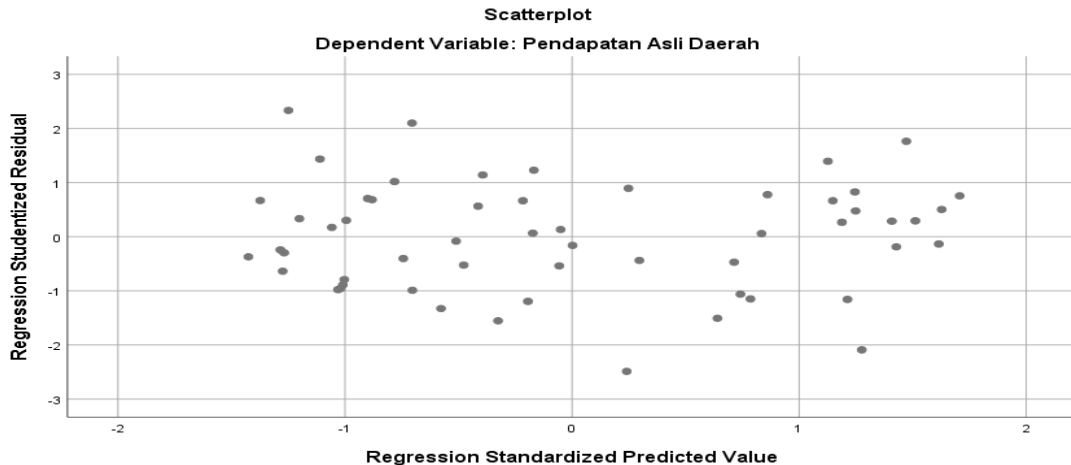
c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.⁸¹ Dalam penelitian ini menggunakan uji heteroskedastisitas dengan scatterplot dan uji heteroskedastisitas dengan uji glejser. Dasar analisis dalam uji heteroskedastisitas dengan scatterplot adalah yang pertama dengan melihat, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Dasar analisis yang kedua adalah jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.⁸² Berikut gambar 4.2 hasil uji heteroskedastisitas dengan scatterplot dalam penelitian ini:

⁸¹ Nawari, *Analisis Regresi dengan MS. Excel 2007 dan SPSS 17*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010, h. 227.

⁸² I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian*, h. 212

Gambar 4. 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot



Sumber: Output SPSS Versi 25, Diolah oleh Peneliti 2022

Berdasarkan gambar 4.2 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi pendapatan asli daerah (Y) berdasarkan variabel independen yaitu pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3).

Analisis dengan menggunakan plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan karena jumlah pengamatan memengaruhi hasil plotting. Semakin sedikit jumlah pengamatan semakin sulit menginterpretasikan hasil grafik plot. Oleh sebab itu, diperlukan uji statistik yang dapat menjamin keakuratan hasil. Salah satu uji statistik yang dapat digunakan

adalah uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen dengan persamaan regresi:

$$|U_t| = \alpha + \beta X_t + v_t$$

Dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas dengan uji glejser adalah jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, namun sebaliknya jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas. Berikut tabel 4.3 hasil uji heteroskedastisitas dengan uji glejser dalam penelitian ini:

Tabel 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	-,165	,490		-,336	,738
	Pajak Daerah	,030	,030	,159	,985	,329
	Retribusi Daerah	-,018	,023	-,125	-,799	,428
	Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	,026	,061	,061	,429	,670

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: Output SPSS Versi 25, Diolah oleh Peneliti 2022

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari pajak daerah (X_1) yaitu 0,329 lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Nilai signifikansi dari retribusi daerah (X_2) yaitu 0,428 lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala

heteroskedastisitas. Nilai signifikansi dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3) yaitu 0,670 lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Dalam penelitian ini menggunakan uji autokorelasi dengan durbin-watson. Uji durbin watson (DW-test) digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen.

Tabel 4. 4
Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dL$
Tidak ada autokorelasi positif	No desicison	$dL \leq d \leq dU$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dL < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No desicision	$4 - dU \leq d \leq 4 - dL$
Tidak autokorelasi, positif atau negatif	Tidak ditolak	$dU < d < 4 - dU$

Keterangan:

dL = Batas Bawah Durbin Watson

dU = Batas Atas Durbin Watson

d = Durbin Watson

Berikut tabel 4.5 hasil uji autokorelasi dengan durbin-watson (DW-test) dalam penelitian ini:

Tabel 4. 5
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,841 ^a	,707	,690	22113719,35331	2,067

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Output SPSS Versi 25, Diolah oleh Peneliti 2022

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai d yang dihasilkan adalah 2,067 sedangkan dari tabel d dengan nilai signifikansi 0,05 (5%) dan jumlah data (n) = 56, serta jumlah variabel independen (k) = 3 diperoleh nilai dL sebesar 1,458 dan dU sebesar 1,683. d terletak antara dU dan (4- dU), di mana 2,067 berada antara 1,683 dan 2,317 yang berarti tidak terjadi autokorelasi.

$$n = 56$$

$$d = 2,067$$

$$dL = 1,458$$

$$dU = 1,683$$

$$4-dL = 4-1,458 = 2,542$$

$$4-dU = 4-1,683 = 2,317$$

Dasar pengambilan keputusan:

$$= dU < d < 4 - dU$$

$$= 1,683 < 2,067 < 2,317$$

2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum dan lainnya.⁸³ Berdasarkan output statistik deskriptif, variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3), dan pendapatan asli daerah (Y). Variabel-variabel tersebut diuji dengan menggunakan program SPSS versi 25. Berikut tabel 4.6 hasil pengujian statistik deskriptif dalam penelitian ini:

Tabel 4. 6
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	56	5003197	118770579	32074962.82	29204973.894
Retribusi Daerah	56	1456424	16457595	6787570.62	4614619.454
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	56	2146125	9903579	6677612.48	1727701.078
Pendapatan Asli Daerah	56	33853527	245980100	90602879.88	54894586.703
Valid N (listwise)	56				

Sumber: Output SPSS Versi 25, Diolah oleh Peneliti 2022

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa jumlah data (N) yang di uji dalam penelitian ini adalah sebanyak 56.

⁸³ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis*, h. 19.

- a. Pada variabel pajak daerah (X_1) selama 4 tahun diketahui bahwa realisasi pajak daerah terkecil (minimum) yaitu Rp5.003.197.000 yang dihasilkan pada tahun 2016 oleh Kabupaten Sukamara. Realisasi pajak daerah terbesar (*maximum*) yaitu Rp118.770.597.000 yang dihasilkan pada tahun 2017 oleh Kabupaten Lamandau. Nilai rata-rata (*mean*) pajak daerah selama 4 tahun sebesar Rp3.207.496.282 dengan standar deviasi sebesar Rp29.204.973.894.
- b. Pada variabel retribusi daerah (X_2) selama 4 tahun diketahui bahwa realisasi retribusi daerah terkecil (minimum) yaitu Rp1.456.424.000 yang dihasilkan pada tahun 2018 oleh Kabupaten Murung Raya. Realisasi retribusi daerah terbesar (*maximum*) yaitu Rp16.457.595.000 yang dihasilkan pada tahun 2018 oleh Kabupaten Seruyan. Nilai rata-rata (*mean*) retribusi daerah selama 4 tahun sebesar Rp678.757.062 dengan standar deviasi sebesar Rp4.614.619.454.
- c. Pada variabel pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3) selama 4 tahun diketahui bahwa realisasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terkecil (minimum) yaitu Rp2.146.125.000 yang dihasilkan pada tahun 2016 oleh Kota Palangka Raya. Realisasi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terbesar (*maximum*) yaitu Rp9.903.579.000 yang dihasilkan pada tahun 2019 oleh Kabupaten Sukamara. Nilai rata-rata (*mean*) pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan selama 4 tahun sebesar Rp667.761.248 dengan standar deviasi sebesar Rp1.727.701.078.

- d. Pada variabel pendapatan asli daerah (Y) selama 4 tahun diketahui bahwa realisasi pendapatan asli daerah terkecil (minimum) yaitu Rp33.853.527.000 yang dihasilkan pada tahun 2016 oleh Kabupaten Murung Raya. Realisasi pendapatan asli daerah terbesar (*maximum*) yaitu Rp245.980.100.000 yang dihasilkan pada tahun 2017 oleh Kabupaten Kotawaringin Timur. Nilai rata-rata (*mean*) pendapatan asli daerah selama 4 tahun sebesar Rp9.060.287.988 dengan standar deviasi sebesar Rp54.894.586.703.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4. 7
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients B
1	(Constant)	,526
	Pajak Daerah	,205
	Retribusi Daerah	,473
	Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	,370

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Output SPSS Versi 25, Diolah oleh Peneliti 2022

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 0,526 + 0,205 + 0,473 + 0,370 + e$$

Persamaan ini mengandung arti bahwa:

- a. Nilai Konstanta sebesar 0,526 artinya variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bernilai 0 maka pendapatan asli daerah memiliki nilai sebesar 0,526.
- b. Variabel pajak daerah yaitu sebesar 0,205 menunjukkan bahwa setiap kenaikan pajak daerah sebesar 1 kali maka pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 0,205.
- c. Variabel retribusi daerah yaitu sebesar 0,473 menunjukkan bahwa setiap kenaikan retribusi daerah sebesar 1 kali maka pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 0,473.
- d. Variabel pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu sebesar 0,370 menunjukkan bahwa setiap kenaikan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 1 kali maka pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 0,370.

4. Pengujian Hipotesis

Untuk mengambil keputusan atas suatu hipotesis, peneliti melakukan pengujian-pengujian berikut, yaitu:

a. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji Statistik t)

Tabel 4. 8
Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji Statistik t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,526	,842		,625	,535
	Pajak Daerah	,205	,052	,259	3,943	,000
	Retribusi Daerah	,473	,040	,762	11,950	,000
	Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	,370	,105	,203	3,524	,001

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Output SPSS Versi 25, Diolah oleh Peneliti 2022

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa hasil uji koefisien regresi secara parsial (uji statistik t) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uji t dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut, mana di antara variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel.

Formulasi menentukan t tabel:

$$n = \text{Jumlah data} = 56$$

$$k = \text{Jumlah variabel independen \& variabel dependen} = 4$$

$$\text{Taraf Sig. (2 sisi)} = 5\% : 2 = 0,025$$

$$df = n - k = 56 - 4 = 52$$

Kolom ke 0,025 dan 0,005 baris ke 52

t tabel = 2,00665

- 1) Pada variabel pajak daerah (X_1) memiliki nilai t hitung sebesar 3,943 dan taraf signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian t hitung sebesar 3,943 lebih besar dari t tabel 2,00665 sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2019 hal ini membuktikan bahwa H_1 diterima.
- 2) Pada variabel retribusi daerah (X_2) memiliki nilai t hitung sebesar 11,950 dan taraf signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian t hitung sebesar 11,950 lebih besar dari t tabel 2,00665 sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2019 hal ini membuktikan bahwa H_2 diterima.
- 3) Pada variabel pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3) memiliki nilai t hitung sebesar 3,524 dan taraf signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian t hitung sebesar 3,524 lebih besar dari t tabel 2,00665 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2019 hal ini membuktikan bahwa H_3 diterima.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut perbandingan nilai t hitung dan taraf signifikansi di antara 3 variabel yang paling dominan berpengaruh signifikan dan positif diperoleh oleh variabel retribusi daerah (X_2) yaitu t hitung sebesar 11,950 dengan taraf signifikansi 0,000. Sedangkan posisi kedua diperoleh oleh variabel pajak daerah (X_1) yaitu t hitung 3,943 dengan taraf signifikansi 0,000. Kemudian posisi terkecil diperoleh oleh variabel pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3) yaitu t hitung 3,524 dengan taraf signifikansi 0,001.

b. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 4. 9
Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,779	3	,926	89,964	,000 ^b
	Residual	,535	52	,010		
	Total	3,315	55			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Sumber: Output SPSS Versi 25, Diolah oleh Peneliti 2022

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil uji koefisien regresi secara simultan (uji statistik F) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Formula menentukan F tabel:

$n = \text{Jumlah data} = 56$

$k = \text{Jumlah variabel independen \& variabel dependen} = 4$

$df_1 = k-1 = 4-1 = 3$

$df_2 = n-k = 56-4 = 52$

Kolom ke 3 baris ke 52

F tabel = 2,78

Hasil uji F sebesar 89,964 dengan tingkat signifikansi 0,000 dan untuk F tabel diperoleh sebesar 2,78. Dikarenakan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung yaitu 89,964 lebih besar dari F tabel yaitu 2,78 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3) berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah (Y).

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. 10
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,916 ^a	,838	,829	,10148

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Sumber: Output SPSS Versi 25, Diolah oleh Peneliti 2022

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa uji koefisien determinasi (R^2) nilai *adjusted r-square* sebesar 0,829 atau 82,9%. Hal ini

menunjukkan bahwa variabel independen yaitu pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah (Y) sebesar 82,9%. Sedangkan, sisanya $100\% - 82,9\% = 17,1\%$ dipengaruhi oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

C. Pembahasan

Berikut ini pembahasan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen:

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang artinya H_1 diterima atau pajak daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan uji F pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3) berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2019. Kemudian uji koefisien determinasi (R^2) pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa

nilai *adjusted r-square* sebesar 0,829 atau 82,9% sisanya $100\% - 82,9\% = 17,1\%$ dipengaruhi oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hani Sri Mulyani dan Siska Ayu Ramdini⁸⁴ yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa jika setiap terjadi kenaikan pada pajak daerah, maka akan mempengaruhi kenaikan pendapatan asli daerah di suatu Kabupaten/Kota. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wulan Purnama Sari dan Miftahuljannah⁸⁵ yang menyatakan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang artinya H_2 diterima atau retribusi daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan uji F pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), dan pengelolaan kekayaan daerah yang

⁸⁴ Hani Sri Mulyani dan Siska Ayu Ramdini, "Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019", *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi*, Vol. 2 No. 2, 2021, h. 151.

⁸⁵ Wulan Purnama Sari dan Miftahuljannah, "Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017)", *E-Journal Equilibrium Manajemen*, Vol. 5, No. 2, 2018, h. 17.

dipisahkan (X_3) berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2019. Kemudian uji koefisien determinasi (R^2) pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai *adjusted r-square* sebesar 0,829 atau 82,9% sisanya $100\% - 82,9\% = 17,1\%$ dipengaruhi oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Intan Ratna Sari⁸⁶ yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah. Sebagaimana halnya pajak daerah, retribusi daerah juga memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah. Apabila retribusi daerah dapat dimaksimalkan pendapatannya maka akan berdampak pada kenaikan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wulan Purnama Sari dan Miftahuljannah⁸⁷ yang menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

3. Pengaruh Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

⁸⁶ Intan Ratna Sari, “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017”, Artikel Skripsi Universitas Nusantara: Kediri, 2018, h. 3.

⁸⁷ Wulan Purnama Sari dan Miftahuljannah, “Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017)”, E-Journal Equilibrium Manajemen, Vol. 5, No. 2, 2018, h. 17.

dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 yang artinya H_3 diterima atau pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan uji F pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3) berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2019. Kemudian uji koefisien determinasi (R^2) pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai *adjusted r-square* sebesar 0,829 atau 82,9% sisanya $100\% - 82,9\% = 17,1\%$ dipengaruhi oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Intan Ratna Sari⁸⁸ yang menyatakan bahwa pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah. Sebagaimana pajak daerah dan retribusi daerah, setiap terjadi kenaikan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maka akan mempengaruhi kenaikan pendapatan asli daerah pada suatu Kabupaten/Kota. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hani Sri

⁸⁸ Intan Ratna Sari, “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017”, Artikel Skripsi Universitas Nusantara: Kediri, 2018, h. 3.

Mulyani dan Siska Ayu Ramdini⁸⁹ yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah.

4. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel pajak daerah dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang artinya H_1 diterima, variabel retribusi daerah dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang artinya H_2 diterima, dan variabel pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 yang artinya H_3 diterima. Sedangkan uji F pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3) secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2019. Dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima. Kemudian uji koefisien determinasi (R^2) pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai *adjusted r-square* sebesar 0,829 atau

⁸⁹ Hani Sri Mulyani dan Siska Ayu Ramdini, “Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019”, *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi*, Vol. 2 No. 2, 2021, h. 151.

82,9% sisanya $100\% - 82,9\% = 17,1\%$ dipengaruhi oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hani Sri Mulyani dan Siska Ayu Ramdini bahwa pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah.⁹⁰

5. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang Paling Dominan Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa berdasarkan perbandingan nilai t hitung dan taraf signifikansi di antara 3 variabel yang paling dominan berpengaruh signifikan dan positif diperoleh oleh variabel retribusi daerah (X_2) yaitu t hitung sebesar 11,950 dengan taraf signifikansi 0,000.

⁹⁰ Hani Sri Mulyani dan Siska Ayu Ramdini, “Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019”, Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi, Vol. 2 No. 2, 2021, h. 151.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian statistik analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini ditemukan bukti empiris sebagai berikut:

1. Pajak daerah berdasarkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_1 diterima yang artinya variabel pajak daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2019.
2. Retribusi daerah berdasarkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_2 diterima yang artinya variabel retribusi daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2019.
3. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berdasarkan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ maka H_3 diterima yang artinya variabel pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2019.
4. Pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berdasarkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_4 diterima yang artinya secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh secara signifikan dan positif

terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2019.

5. Berdasarkan perbandingan nilai t hitung dan taraf signifikansi di antara 3 variabel yang paling dominan berpengaruh signifikan dan positif diperoleh oleh variabel retribusi daerah (X_2) yaitu t hitung sebesar 11,950 dengan taraf signifikansi 0,000.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan agar meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan cara melakukan pendataan ulang bagi wajib pajak dan retribusi dalam rangka untuk meningkatkan potensi dari pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selain itu, diharapkan agar pemerintah 13 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kalimantan Tengah memperhatikan potensi di daerahnya masing-masing hal ini dikarenakan berdasarkan data yang peneliti peroleh hanya Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat yang dapat memberikan sumbangan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah meningkat pada 4

tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2019 dibandingkan Kabupaten/Kota yang lainnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar memperbanyak sampel dan memperbarui lagi untuk data PAD tahun-tahun berikutnya. Selain itu, bagi penelitian selanjutnya dapat menambah variabel atau mengganti variabel lain untuk mendapatkan temuan-temuan baru yang lebih bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggara, Sahya. *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: Pustaka Setia. 2016.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah. *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2017*.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah. *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2018*.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah. *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2019*.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah. *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2016*.
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi 4*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2017.
- Djaenuri, M. Aries. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2014.
- Firdaus. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Analisis Regresi IBM SPSS Statistics Version 26.0*. Bengkalis: Dotplus Publisher. 2021.
- Firdausy, Carunia Mulya. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2017.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Undip. 2018.
- Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Quadrant. 2021.

- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 2018.
- Nawari. *Analisis Regresi dengan MS. Excel 2007 dan SPSS 17*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2010.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII dan Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2014.
- Putra, Windhu. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah* Depok: Rajawali Pers. 2018.
- Santoso, Agung Budi. *Tutorial & Solusi Pengolahan Data Regresi*. Maluku: Agung Budi Santoso. 2018.
- Sugiharti, Dewi Kania dkk. *Hukum Pajak*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta. 2018.
- Sumarsan, Thomas. *Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Indeks. 2013.
- Widodo. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2018.

B. Jurnal dan Artikel

- Hafandi, Yusuf dan Romandhon. *Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo*. Jurnal Of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech), Vol. 3, No. 2, 2020.
- Karo, Surbakti Karo. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Kabupaten Kota di Sumatera Utara*. Jurnal Telaah Akuntansi, Vol. 17, No. 01, Juni 2014.
- Mulyani, Hani Sri dan Siska Ayu Ramdini. *Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*

Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi, Vol. 2 No. 2, 2021.

Sari, Intan Ratna. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017*. Artikel Skripsi Universitas Nusantara: Kediri. 2018.

Sari, Wulan Purnama dan Miftahuljannah. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017*. E-Journal Equilibrium Manajemen, Vol. 5, No. 2, 2018.

C. Skripsi dan Tesis

Burhanudin. *Analisis Kinerja dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonosobo*. Tesis STIE Widya Wiwaha: Yogyakarta. 2017.

Dahlia, Iis. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir*. Skripsi UIN Suska Riau. 2017.

Nursali, Mardani. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan*. Skripsi Universitas Muhammadiyah: Palembang. 2017.

D. Internet

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
<https://www.bps.go.id/menu/1/informasi-umum.html> (Diakses pada tanggal 13 Desember 2021, pukul 10.29 WIB).

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
<https://www.bps.go.id/menu/1/visi-dan-misi.html> (Diakses pada tanggal 13 Desember 2021, pukul 10.29 WIB).

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan->

pendapatan-daerah (Diakses pada tanggal 12 Agustus 2021, pukul 08.51 WIB).

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
<https://dishut.kalteng.go.id/page/87/letak-batas-dan-luas-wilayah> (Diakses pada tanggal 26 Maret 2021, pukul 20.48 WIB).

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/pajak>. (Diakses pada tanggal 10 Agustus 2021, pukul 19.59 WIB).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000, <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=450> (Diakses pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 08.49. WIB)

Zulfikar, Fahri. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5654126/5-pulau-terbesar-di-indonesia-di-antaranya-juga-terluas-di-dunia> (Diakses pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 07.47 WIB).

E. Sumber Lain

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta. 2006.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.